

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi selalu muncul sebagai isu sentral dalam setiap episode sejarah peradaban manusia, utamanya sejak zaman yang sering disebut sebagai Yunani Kuno. Hal ini terjadi, karena secara faktual demokrasi telah menjadi semacam spirit radikal-universal bagi individu atau sekelompok individu yang bernaung di bawah institusi negara untuk terlibat dalam pergulatan politik dalam rangka mewujudkan cita-cita kemanusiaan universal, yaitu terbentuknya tata sosial yang adil, egaliter dan manusiawi. Demokrasi merupakan salah satu isu dan wacana yang mampu mengintegrasikan cita-cita ideal manusia sejangad, karena wacana demokrasi mampu melintasi sekaligus melampaui batas-batas geografis, suku bangsa, agama dan kebudayaan.¹

Dalam pepatah Latin dikatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan (*vok populi vox Dei*). Oleh karena itu kedaulatan rakyat tidak boleh dikompromikan dengan apa dan siapapun, sehingga kehendak rakyat seakan-akan kehendak Tuhan. Disamping itu, ada juga pepatah yang mengatakan kekuasaan rakyat adalah hukum yang paling tinggi (*salus populi supreme lex*). Oleh karena itu, dalam demokrasi ditetapkan bahwa hukum yang paling tinggi adalah kehendak rakyat.²

¹ Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm. 11.

² Jaih Mubarak, *Fikih Siyasah: Studi tentang Ijtihad dan Fatwa Politik di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm. 47.

Kejatuhan Presiden Soeharto dari kursi kekuasaannya pada 21 Mei 1998 telah membawa perubahan politik secara dramatis di Indonesia. Indonesia telah memasuki fase “liberalisasi politik awal” yang ditandai antara lain oleh terjadinya redefinisi hak-hak politik rakyat. Setiap kalangan menuntut kembalinya hak-hak politiknya yang selama bertahun-tahun diberangus oleh Orde Baru.³

Pada masa transisi ini wacana tentang kebebasan, hak asasi manusia, keterbukaan dan sebagainya menjadi begitu terbuka. Namun di kalangan kaum pro reformasi masa transisi ini belum mengindikasikan adanya komitmen baru yang reformis dan juga tidak menjanjikan masa depan baru yang lebih demokratis. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah Indonesia pasca lepas dari otoritarianisme rezim Soeharto akan terjatuh lagi dalam otoritarianisme dalam bentuk yang lebih canggih? Yang tentunya hal itu tidak diinginkan oleh kaum pro reformasi.⁴

Suatu fenomena penting yang mewarnai transformasi masyarakat global akhir-akhir ini adalah menguatnya tuntutan demokrasi, khususnya di negara-negara berkembang, termasuk di negara yang mayoritas berpenduduk Islam. Kuatnya tuntutan demokrasi itu tak lain, karena adanya asumsi bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang dapat menjamin keteraturan politik

³ Eep Saefulloh Fatah, *Menuju Format Baru Politik Islam: Belajar Dari Kekeliruan Politik Lama*, Dalam Buku *Politik Demi Tuhan, Nasionalisme Religius Di Indonesia*, Andito (Abu Zahra), (Ed.), Bandung: Pustaka Hidayah, 1999, hlm. 389.

⁴ Dalam sejarah transisi rezim di Indonesia nyaris selalu terjerembab kembali dalam jurang otoritarianisme baru. Hal itu dapat dilihat dalam sejarah Indonesia setelah lepas dari otoritarianisme Belanda dan Jepang (1945), pemerintahan pribadi rezim Soekarno (1965), rezim Orde Baru Presiden Soeharto yang didukung Militer (1966-1998), Muhammad Syifa Amin, *Indonesia Via Transisi Menuju Demokrasi*, dalam buku *Problematika Politik Islam di Indonesia*, Abudin Nata (ed.) Jakarta: PT. Grasindo kerjasama UIN Jakarta Press, 2002, Hlm. 108-112.

sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju struktur sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang lebih ideal.⁵

Kecenderungan dan minat yang sangat kuat terhadap demokrasi dan demokratisasi ini kemudian mendorong hampir semua rezim negara-negara berkembang untuk melakukan reformasi politik dan penyesuaian-penyesuaian, terhadap tuntutan yang terus meningkat. Kalaupun beberapa rezim itu secara empirik lebih mengedepankan keamanan (*establishment*) dari pada demokrasi, mereka tetap menggunakan demokrasi sebagai retorika politik untuk mencari legitimasi. Karenanya, beberapa rezim otoritarian di negara berkembang tetap mengklaim pemerintahannya sebagai penganut sistem demokrasi atau sekurang-kurangnya sedang dalam proses ke arah itu.⁶

Studi Samuel Huntington menunjukkan bahwa lebih dari 30 negara di Eropa Selatan, Eropa Timur, Amerika Latin dan Asia Timur pada akhir abad ke-20 ini, telah mengalami transisi dari sistem politik yang tidak demokratis menuju sistem politik yang demokratis. Huntington menyatakan kecenderungan ini sebagai “Gelombang Demokratisasi Ketiga”.⁷ Tuntutan demokratisasi dan maraknya diskursus demokrasi dengan intensitas yang cukup tinggi juga terjadi di beberapa negara Islam yang membentang dari Maroko di Afrika Barat sampai di ujung Asia Tenggara.

Setidaknya, selain faktor ekonomi, tuntutan demokratisasi di berbagai wilayah Islam itu juga didorong oleh dua faktor berikut ini: pertama, secara

⁵ *Ibid.*, hlm. 23-25.

⁶ Lihat Ignas Kleden, “*Oposisi dalam Politik Indonesia*”, dalam Musa Khadzim (ed), *Menuju Indonesia Baru : Menggagas Reformasi Total*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1988, hlm. 152.

⁷ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995, hlm. 6.

faktual di beberapa kawasan ini utamanya yang menganut sistem politik sentralistik atau monarki seperti Timur Tengah, sistem yang ada cenderung lebih represif dan korup, pada saat yang sama pertumbuhan ekonomi cenderung lamban dan tingkat pengangguran makin tinggi. Kenyataan ini tidak bisa tidak, telah menimbulkan tuntutan baru, utamanya dikalangan muda yang ingin melihat negaranya lebih demokratis. *Kedua*, di beberapa kawasan Islam itu muncul kelas-kelas intelektual yang secara serius dan konsisten memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang dianggap suatu keharusan bagi peradaban manusia. Kaum intelektual generasi baru itu tumbuh subur terutama di negara-negara yang sistem politiknya relatif memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengeluarkan pikiran dan pendapatnya.

Sudut pandang demokrasi sebagai kategori dinamis memungkinkan terajadinya hal yang dapat disebut ironis, seperti jika sebuah negara yang kini disebut (paling) demokratis, katakanlah Amerika Serikat, justru akan dinilai tidak lagi demokratis jika ia menunjukkan gejala “stagnasi” (kemandekan) dengan menghambat laju tuntutan dan pelaksanaan kebebasan-kebebasan asasi dari para warganya. Apalagi jika kepada kategori pengujian kedemokrasian negara itu dimasukkan pula unsur seberapa jauh terlaksana dengan nyata prinsip kesamaan umat manusia, maka Amerika dan negara-negara Barat lainnya menjadi kurang demokratis dibandingkan dengan negara-negara di “dunia ketiga”. Sebab di negara Barat itu masih banyak paham warga kulit atau rasialisme dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, dapat disebut bahwa suatu negara berkembang pun dalam perspektif Eichler, seperti yang dikutip oleh Cak Nur mungkin harus dipandang sebagai “lebih demokratis” jika padanya terjadi proses-proses perkembangan kemajuan sejati dalam mewujudkan dan melaksanakan kebebasan asasi, seperti kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul. Maka yang amat perlu diperhatikan dalam perspektif tentang demokrasi seperti itu ialah adanya pesan (*message*) tentang pentingnya proses perkembangan dan bahaya kemandekan. Masyarakat demokratis cenderung ribut, tapi keributan dinilai pasti lebih baik daripada ketenangan karena kemandekan.⁸

Masyarakat Indonesia selalu dapat dibuat percaya bahwa demokrasi adalah sesuatu yang dapat ditunda, kalau ada urgensi yang lebih mendesak. Soekarno mendahulukan *nation building* dan menunda demokrasi. Soeharto mendahulukan pembangunan ekonomi juga menunda demokrasi. Untuk menghindari isu demokrasi Soeharto mempersenjatai dirinya dengan Demokrasi Pancasila⁹, yang apapun tujuannya telah menimbulkan akibat yang sangat nyata, kebebasan demokrasi dan partisipasi politik mengalami pemasungan secara besar-besaran.¹⁰

⁸ Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Cet.I., Jakarta: Paramadina, 1999, hlm. 102-103.

⁹ Istilah Demokrasi Pancasila muncul secara resmi pada tahun 1968, melalui ketetapan MPRS NO. XXXVII/MRRS/1968, tetapi tidak dijelaskan secara rinci esensi dan mekanisme pelaksanaan Demokrasi Pancasila, Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid Dan Amin Rais*, Jakarta: Teraju, 2005, hlm. 181.

¹⁰ Rusydi A.N, *Menuju Reformasi Total, Dalam Buku Problematika Politik Islam di Indonesia*, hlm.123.

Perolehan paling asasi bagi rakyat Indonesia dari keberhasilan gerakan reformasi ialah kembalinya kebebasan setelah hilang sekian puluh tahun lamanya. Pangkal kebebasan itu ialah tiga kebebasan asasi: kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkumpul dan kebebasan berserikat. Lekat sekali dengan kebebasan itu ialah kebebasan dari rasa takut. Setelah hilang sekian lama, siapapun sekarang merasakan kebebasan-kebebasan itu sangat berharga dan membawa rasa bahagia.¹¹

Dalam orde reformasi ini kebebasan asasi harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Kebebasan menyatakan pendapat harus diwujudkan. Kebebasan berkumpul melahirkan keharusan untuk melaksanakan dan menjaga kebebasan mengadakan pertemuan-pertemuan. Kebebasan berserikat, mendirikan perkumpulan. Namun kebebasan itu tidak berarti dibenarkannya pelaksanaan kebebasan tanpa batas. Seperti peringatan Bung Hatta dalam *Demokrasi Kita*, kebebasan tanpa batas hanya akan mengundang lawannya, yaitu penindasan. Sebab, situasi kacau akibat kebebasan tidak terkekang dan tidak bertanggung jawab hanya akan menjadi alasan pembenaran bagi tampinya orang kuat, dan orang itu akan bertindak mengatasi kekacauan dengan tangan besi.¹²

Bila demokratisasi berjalan dengan jujur dan adil, maka secara otomatis aksi-aksi kekerasan dan radikalisme akan dapat diminimalkan. Sebaliknya, bila demokrasi hanya sebatas simbol dan slogan, dimana kecurangan dan arogansi individu dan kelompok lebih dominan, maka

¹¹ Nurcholish Madjid, *Kebebasan, Kepartaian, dan demokrasi, dalam buku Politik Demi Tuhan*, Abu Zahro (ed), Bandung: Pustaka Hidayah, 1999, hlm. 381.

¹² *Ibid.* hlm. 383.

ketidakpuasan dan sikap frustrasi kelompok lain akan berubah menjadi aksi kekerasan. Pada hakikatnya, demokrasi menjunjung tinggi kepentingan dan kebaikan bersama yang diputuskan berdasarkan musyawarah dan undang-undang. Semua kalangan diperlakukan secara manusiawi dan adil. Arogansi suatu kelompok atau negara akan menghancurkan nilai-nilai demokrasi dan menyuburkan bibit-bibit radikalisme.

Jika persoalan itu dibawa ke Indonesia, maka yang harus dilihat adalah ada tidaknya proses-proses menuju pada pelaksanaan *check list* demokrasi tersebut. Berdasarkan itu barangkali dalam penglihatan Eichler, Indonesia harus digolongkan sebagai “negara demokrasi”. Dengan mengatakan negara kita demokratis, berarti menyisihkan ruang dan hak keabsahan bagi diri kita untuk betul-betul berpikir dan berperilaku demokratis dan untuk menuntut dari semua orang agar berbuat serupa, khususnya dari mereka yang tergolong “penentu kecenderungan” (*trend maker*) dengan kekuatan yang efektif.

Dari deskripsi di atas, sangatlah urgen apabila implementasi demokrasi berjalan ideal seiring dengan sirkulasi perpolitikan untuk membawa angin segar bagi kehidupan demokratisasi di Indonesia. Oleh karena itu, gagasan-gagasan yang telah dicetuskan oleh para pembaharu di negeri ini sudah seharusnya diterapkan, guna memberikan cerminan bagi negara-negara yang cenderung dengan menggunakan kekuasaan tangan besi atau despotik. Karena melihat berkelindangnya arus deras globalisasi sekarang ini, menjadikan semakin sempitnya dunia yang disebabkan oleh berkembangnya teknologi informasi yang mengejutkan.

Dengan kondisi yang seperti itu, maka berpengaruh pula negara-negara di belahan Timur, Asia Tenggara, khususnya Indonesia untuk beradaptasi bergejolaknya gelombang pasar bebas, sehingga sangat mengganggu bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis. Sudah banyak tokoh pembaharu di Indonesia ini yang menggagas situasi perpolitikan, masyarakat madani (*civil society*) dan demokrasi dengan memerhatikan situasi politik dan ketatanegaraan dalam era di masing-masing pemerintahan yang selalu terus berganti. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh di negeri ini adalah Nurcholish Madjid. Berbagai gagasan pemikirannya selalu mendapatkan respon dari tokoh, ulama, negarawan atau politisi di Indonesia yang tidak sedikit menimbulkan kontroversial.

Diantara dari pemikirannya ialah konsepsi tentang demokrasi yang telah digagasnya karena berangkat dari situasi politik kenegaraan ketika itu di bawah pemimpin siapa yang berkuasa dan sebagian suntikan dari negara-negara Barat yang berpengaruh terhadap kehidupan demokrasi Pancasila di Indonesia. Gagasan dan pemikiran Cak Nur tentang demokrasi dan demokratisasi makin produktif menjelang, pada saat dan pasca reformasi 1998. Tulisan, ceramah dan komentar-komentar Cak Nur tentang partisipasi politik, pemilu yang bebas, badan perwakilan yang efektif, sirkulasi elit yang damai, pentingnya kontrol terhadap kekuasaan, kompetisi politik yang sehat, etika politik, pluralisme dan hak minoritas, masyarakat madani, kelas menengah, persamaan di depan hukum, dan lain-lain, jelas merupakan sumbangan yang besar bagi proses penyebaran ide-ide demokrasi di

Indonesia. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengkajinya lebih dalam terkait dengan demokrasi yang telah digulirkan selama ini. Karena bagaimanapun demokrasi selalu berjalan dinamis ke arah yang lebih baik untuk menuju ke titik yang ideal (*kaffah*). Maka sangatlah urgen apabila penulis memaparkannya dalam bentuk skripsi ini yang berjudul “***ANALISIS PEMIKIRAN NURCHOLIS MADJID TENTANG DEMOKRASI***”

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran Nurcholish Madjid tentang partisipasi masyarakat dan kebebasan dalam demokrasi ?
2. Bagaimana pemikiran Nurcholish Madjid tentang penegakkan hukum dan keadilan sosial dalam demokrasi ?

C. Tujuan Penulisan

Memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Untuk mendapatkan kejelasan pemikiran Nurcholish Madjid tentang Demokrasi.
2. Untuk mengetahui pemikiran Nurcholish Madjid tentang Partisipasi Masyarakat, kebebasan, penegakkan hukum, dan keadilan sosial dalam demokrasi?

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu telah pustaka juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai “*Analisis Pemikiran Nurcholis Madjid Tentang Demokrasi*”, penulis akan menelaah beberapa penelitian untuk dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian ini. Sehingga akan terlihat letak perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian atau karya tulis yang ada.

Berikut ini adalah beberapa studi/tulisan yang membahas seputar pemikiran sosial politik Nurcholis Madjid. Diantaranya, adalah *Agama dan Negara, Analisis Kritis pemikiran politik Nurcholis Madjid*, ditulis oleh Muhammad Hari Zamharir yang diterbitkan oleh Murai Kencana pada tahun 2004, dikaji perihal Islam dan politik, hubungan historis pergerakan Islam Indonesia dengan Nasionalisme, dan implikasi pemikiran politik Nurcholis Madjid terhadap budaya politik “golongan” Islam. Kemudian buku *Sekularisasi dalam Polemik* yang ditulis oleh Pardoyo, yang sekapur sirihnya ditulis langsung oleh Nurcholish Madjid. Buku yang ditulis tahun 1993 ini secara umum berisi tentang tinjauan umum terhadap masalah sekularisasi,

berbagai pandangan tentang sekularisasi, penilaian terhadap masalah sekularisasi, dan wajah sekularisasi di Indonesia.

Selain itu, buku Marwan Saridjo dengan judul *Cak Nur: Diantara Sarung dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab*. Buku yang ditulis pada tahun 2005 ini merupakan sebuah tulisan tentang 2 tokoh, yaitu Cak Nur dan Musdah Mulia. Penulis hanya mengambil tokoh Cak Nur, karena tema yang diambil oleh penulis adalah pemikiran Cak Nur, isi dari buku ini sendiri mengisahkan dari awal perjalanan Cak Nur, mulai dari pendidikan, latar belakang keluarga, mengisahkan desa Cak Nur nan jauh di sana, pernikahan, pemikiran hingga kepada Yayasan Paramadina, pembahasan dalam buku ini hanya membicarakan Cak Nur secara umum.

Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid, merupakan sebuah buku yang dikarang oleh Junaidi Idrus pada tahun 2004. Dalam buku berhalaman 151 ini, sang penulis melakukan sebuah kajian kritis terhadap pribadi dan pemikiran Nurcholish Madjid secara umum. Secara umum isi buku tersebut menerangkan latar belakang Intelektualitas Nurcholish Madjid, yaitu latar belakang internal “Pendidikan yang ditempuh oleh Nurcholish Madjid” dan latar belakang eksternal, yaitu tokoh dan suasana “iklim politik di Indonesia” yang mempengaruhi pemikiran Nurcholish Madjid. Setelah itu sang penulis menggambarkan tema-tema pemikiran Nurcholish Madjid di bidang kebudayaan, pendidikan dan bidang politik, setelah itu gagasan-gagasan pembaruan pemikiran Nurcholish Madjid dalam bidang keIslaman menjadi tema berikutnya, dan salah satu pembahasannya berkaitan dengan sekularisasi.

Kemudian ada buku yang berjudul : *Masyarakat Tamaddun, Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, yang ditulis oleh Sufyanto yang pada mulanya adalah skripsi dengan judul aslinya “*Elaborasi Konsep masyarakat Madani Nurcholish Madjid: Tinjauan Hermeneutika Sosial*”, buku ini secara umum berisi tentang sejarah masyarakat madani, pemikiran Nurcholis tentang masyarakat madani yang di dalamnya berisi tentang kedudukan manusia di bumi, ketaatan terhadap pemimpin dan mengenai musyawarah atau konsultasi, yang di dalamnya juga di bicarakan mengenai Piagam Madiah.

Selain buku-buku tersebut di atas, di Fakultas Syari’ah sendiri, berdasarkan penelusuran penulis sudah ada tiga orang yang membuat skripsi dengan pemikiran tokoh Nurcholish Madjid. Skripsi pertama dibuat oleh Khaerul Anwar “NIM: 2194132”, judul yang digunakan adalah *Study Analisis Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Masyarakat Madani*, disini penulisnya mencoba menganalisis pendapat Nurcholish mengenai masyarakat madani dengan semangat metodologi historis-filosofisnya begitu optimis masyarakat madani di Indonesia dapat diaplikasikannya dengan bercermin pada cara kehidupan masyarakat Madinah (masyarakat *al-salaf al-shalih* dengan konstitusi piagam madiyahnya), dari hasil analisisnya perspektif masyarakat madani di Indonesia dapatlah dirumuskan secara sederhana yaitu membangun masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis dengan landasan taqwa kepada Allah SWT, dalam arti semangat ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan signifikansi pemikiran Nurcholish tersebut dalam rangka membangun

masyarakat madani di Indonesia menurut teladan Nabi lebih terbuka dan bahkan mungkin kesempatannya justru lebih besar.

Skripsi yang kedua dibuat oleh Akhmad Jamil “NIM: 2194173” dengan judul *Menggagas Konsep Oposisi Loyal terhadap Pemerintah menurut Dr. Nurcholish Madjid (Mencari format Oposisi KeIndonesiaan perspektif Fiqh Siyasah)*. Skripsi ini juga menganalisis konsep oposisi loyal yang digagas oleh Nurcholis Madjid yang menurut dalam pandangannya prinsip dan esensi dari oposisi loyal ini adalah “*chek and balance*”. Dan dalam al-Quran juga terdaat prinsip *al-amru bi al-ma'ruf wa al-nahyu 'al-mungkar*, yaitu membela hak atau malah mengajak kepada tiap individu untuk mengritik, mengubah atau meralat pelanggaran dan kejahatan jika dia menyaksikan atau mengantisipasi terjadinya kemungkaran.

Skripsi yang ketiga di buat oleh Abdullah Aziz “NIM: 2101323” dengan judul *Studi Analisis Pemikiran Nurcholis Madjid tentang sekularisasi politik*, disini permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pemikiran Nurcholish mengenai sekularisasi dalam bidang politik dan bagaimana relevansinya terhadap perpolitikan di Indonesia dari permasalahan tersebut jawaban yang di hasilkan adalah wacana yang dilakukan Nurcholis ternyata menimbulkan optimesme sekaligus kekhawatiran. Bagi yang pro ke Nurcholish, optimesme, Nurcholish dipandang sebagai pembaharu yang mampu mendongkrak kebekuan pemikiran umat dan menawarkan sejumlah konsep yang menyegarkan dan menjanjikan kedamaian di masa depan. Sementra bagi kelompok yang kontra khawatir. Nurcholish justru dianggap

sebagai pemicu yang menimbulkan masalah dan mengacaukan strategi perjuangan umat Islam yang konon telah menjadi konsensus para aktifis gerakan Islam atau partai Islam.

Dari apa yang telah penulis paparkan, sepengetahuan penulis, belum ada satu karya pun yang membahas tentang demokrasi dalam pemikiran politik Nurcholish Madjid.

Maka dengan tetap merujuk dari beberapa studi /literatur yang telah ada dia atas, menurut hemat penulis, penting sekali membahas tentang pemikiran politik Nurcholish Madjid, sebagai tokoh yang oleh majalah tempo dijuluki sebagai “lokomotif” gerbong pembaruan pemikiran Islam di tanah air, Cak Nur, begitu ia biasa dipanggil, tidak pernah ketinggalan untuk mengemukakan gagasan “ \ menarik” dalam berbagai bidang, termasuk yang terpenting kaitannya dengan penelitian ini, adalah perihal tentang demokrasi.

E. Metode Penulisan

1. Metode pengumpulan Data

Secara metodologis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan bentuk deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena fokus penelitian ini menitik beratkan pada kajian konseptual yang berupa butir-butir pemikiran dan bagai mana pemikiran itu tersosialisasikan.

Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data dengan menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi yang mengandalkan karya tulis kepustakaan yang berupa buku-buku dan makalah-makalah atau artikel.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah data yang di dapat oleh penulis dari objek penelitian. Data ini disebut juga data asli. Sumber primer disini ialah data yang ditulis sendiri oleh Nurcholis Madjid yang berkaitan dengan tema yang akan penulis teliti.

Sekedar contoh buku, *Cita-Cita politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999; *Dialog Keterbukaan, Artikulasi nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 1998; *Atas Nama Pengalaman Beragama dan Berbangsa di Masa Transisi*, Jakarta: Paramadina, 2002; *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Paramadina, 2000 *Aspirasi Umat Islam Indonesia; Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1992. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1989.

Sedangkan yang ditulis oleh orang lain tentang pemikiran Cak Nur dan konsep-konsep yang ia kembangkan, dikategorikan sebagai sumber sekunder. Seperti yang telah disampaikan dalam telaah pustaka diatas.

2. Metode analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan metode analisa data kualitatif¹³ dengan analisa data deskriptif inter pretatif, yang

¹³ Adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya, atau sebagaimana aslinya, dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta : Gajahmada University Press, 1996, hlm. 174.

bertumpu pada titik tolak hermeneutik¹⁴, yaitu suatu cara pendekatan yang melihat secara tajam latar belakang obyek penelitian. Kemudian menginterpretasikannya secara penuh atas fakta-fakta pemikiran dan pandangan subyek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memahami latar belakang pemikiran seorang tokoh yang berada dalam ruang dan waktu yang berbeda dengan masa dimana peneliti berada. Dengan metode ini diharapkan mengetahui bagaimana dan sejauhmana hubungan pemikiran, dalam hal ini pemikiran Nurcholis Madjid dengan latar belakang serta situasi dan kondisi yang menyertainya.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II. Islam dan Demokrasi. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum tentang demokrasi, pengertian demokrasi, konsep demokrasi, Islam dan demokrasi, kemudian keunggulan dan kritik terhadap demokrasi.

Bab III. Persepsi Pemikiran Politik Nurcholish Madjid tentang demokrasi. Dalam bab ini berisi tentang biografi Nurcholish Madjid,

¹⁴ Pengambilan titik tolak hermeneutik ini karena berkaitan dengan data tekstual yang perlu pemaknaan suatu analog-teks, yang biasanya kabur remang-remang kadang-kadang bertentangan satu sama lainnya agar menjadi jelas dalam suatu pemahaman yang berarti. Lihat prof.DR.Lexy J. Moleong, M. A, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 278.

perspektif Nurcholish Madjid tentang demokrasi, dan pemikiran Nurcholis Madjid tentang partisipasi masyarakat dalam demokrasi.

Bab IV. Dalam bab ini berisi mengenai Pemikiran Nurcholis Madjid tentang kebebasan, penegakkan hukum, dan keadilan sosial dalam demokrasi.

Bab V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, saran-saran, dan kata penutup.